BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Perat 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan d Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peratu Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan Anggaran 2018 sebagai landasan operasional Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 ten Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, T Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta Negara yang Bersih dan Bebas dari Ko Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahu Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 te Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 te Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten Daerah (Lembaran Negara Republik Indo Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beb dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tah Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan W (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, T Negara Republik Indonesia Nomor 4502) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2 Perimbangan (Lembaran Negara Republik Ind Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaha Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaim dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tah Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nom Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 Penyusunan dan Penerapan Standar P (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, T Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah K Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Ke DPRD, dan Informasi Laporan Penyelengga Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambaha Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahu Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembara Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambaha Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Ind Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 200 Keuangan Kepada Partai Politik (Lembara Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambaha Republik Indonesia Nomor 4972)) sebagai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tah Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemung dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 Daerah (Lembaran Negara Republik Indo Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 Daerah (Lembaran Negara Republik Indo Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republ 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, T Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga Daerah (Lembaran Negara Republik Indo Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Keuangan dan Administratif Pimpinan da Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tel kali terakhir dengan Peraturan Presiden No (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 T Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bad Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 T Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sos dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 T Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indo Nomor 825);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 T Pengelompokan Kemampuan Keuangan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bara 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Nomor 8);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bar 2011 tentang Pajak Daerah Kabupate (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung B Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bar 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nom telah diubah dengan Peraturan Daerah K Barat Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bar 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomo

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bar 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomo

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bar Tahun 2016 tentang Pembentukan dan S Daerah;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bar 2017 Nomor tentang Hak Keuangan dan Ad dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampung Barat;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah K Barat Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN A

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201

1	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	45,153,983,659
	b. Dana perimbangan	Rp	860,612,627,000
	c. Lain-lain pendapatan daerah		
	c. yang sah.....	Rp	230,228,236,002
	Jumlah Pendapatan	Rp	
2	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp	363,375,940,808
	2) Belanja bunga	Rp	-
	3) Belanja subsidi	Rp	899,887,500
	4) Belanja hibah	Rp	11,355,915,000
	5) Belanja bantuan sosial	Rp	150,000,000
	6) Belanja bagi hasil	Rp	1,116,520,370
	7) Belanja bantuan keuangan	Rp	168,507,457,683
	8) Belanja tidak terduga	Rp	890,853,477
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	
	b. Belanja Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp	63,815,662,149
	2) Belanja barang dan jasa	Rp	244,951,382,286
	3) Belanja Modal	Rp	289,684,109,388
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	

Jumlah Belanja ..... Rp

Surplus (defisit) ..... Rp

3 Pembiayaan

a. Penerimaan ..... Rp 10,252,882,000

b. Pengeluaran ..... Rp 1,500,000,000

Jumlah Pembiayaan Netto..... Rp

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasa dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci l Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah seba dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pas bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peratu lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerj sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lam

Ditetapkan di

pada tanggal, 8 Des

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 66

SALINAN

DAERAH

uran Daerah Nomor
an Belanja Daerah
ran Bupati tentang
ja Daerah Tahun
pelaksanaan APBD

tang Pembentukan
(Lembaran Negara
ambahan Lembaran

ng Penyelenggaraan
rupsi, Kolusi dan
n 1999 Nomor 75,
sia Nomor 3851);

tentang Keuangan
Tahun 2003 Nomor
Indonesia Nomor

ng Perbendaharaan
Tahun 2004 Nomor
Indonesia Nomor

ntang Pemeriksaan
Keuangan Negara
n 2004 Nomor 66,
sia Nomor 4400);

4 tentang Sistem
an Negara Republik
n Lembaran Negara

ntang Perimbangan
merintahan Daerah
2004 Nomor 126,
sia Nomor 4438);

tang Pajak Daerah
Republik Indonesia
an Negara Republik

tang Pemerintahan
nesia Tahun 2014
Republik Indonesia
erapa kali terakhir
5 (Lembaran Negara
ambahan Lembaran

un 2000 tentang
akil Kepala Daerah
2000 Nomor 210,
sia Nomor 4028);

n 2005 tentang
(Lembaran Negara
ambahan Lembaran
sebagaimana telah
or 74 Tahun 2012
2012 Nomor 171,
sia Nomor 5340);

005 tentang Dana
onesia Tahun 2005
Republik Indonesia

05 tentang Sistem
Negara Republik
n Lembaran Negara
ana telah diubah
un 2010 (Lembaran
or 110, Tambahan
155);

n 2005 tentang
Negara Republik
n Lembaran Negara

5 tentang Pedoman
elayanan Minimal
2005 Nomor 150,
sia Nomor 4585);

tentang Pelaporan
(Lembaran Negara
ambahan Lembaran

7 tentang Laporan
epada Pemerintah,
pala Daerah Kepada
raan Pemerintahan
Negara Republik
n Lembaran Negara

n 2007 tentang
n Negara Republik
n Lembaran Negara

tentang Pendanaan
onesia Tahun 2008
Republik Indonesia

9 tentang Bantuan
n Negara Republik
n Lembaran Negara
mana telah diubah
un 2012 (Lembaran
or 195, Tambahan
351);

tentang Tata Cara
utan Pajak Daerah
Republik Indonesia
an Negara Republik

0 tentang Standar
Republik Indonesia
an Negara Republik

1 tentang Pinjaman
nesia Tahun 2011
Republik Indonesia

12 tentang Hibah
nesia Tahun 2012
ik Indonesia Nomor

n 2014 tentang
(Lembaran Negara
ambahan Lembaran

n 2017 tentang
ran Pemerintahan
nesia Tahun 2017
Republik Indonesia

2017 tentang Hak
n Anggota Dewan
Republik Indonesia
an Negara Republik

tentang Pengadaan
ah diubah beberapa
mor 4 Tahun 2015
un 2015 Nomor 5,
sia Nomor 5655);

ahun 2006 tentang
sebagaimana telah
ran Menteri Dalam
Tahun 2011 Nomor

ahun 2007 tentang
an Layanan Umum

ahun 2011 tentang
ial yang bersumber
rah (Berita Negara
sebagaimana telah
ran Menteri Dalam
Republik Indonesia

ahun 2017 tentang
dan Belanja Daerah
nesia Tahun 2017

ahun 2017 tentang
Daerah Serta
Operasional (Berita
r 1067);

t Nomor 8 Tahun
Keuangan Daerah
Barat Tahun 2008

at Nomor 1 Tahun
n Lampung Barat
arat Tahun 2011

at Nomor 3 Tahun
Lembaran Daerah
or 3), sebagaimana
abupaten Lampung
Daerah Kabupaten

at Nomor 4 Tahun
Lembaran Daerah
r 4);

at Nomor 5 Tahun
(Lembaran Daerah
r 5);

at Nomor 8 Tahun
usunan Perangkat

at Nomor 3 Tahun
ministratif Pimpinan
Daerah Kabupaten

Barat Nomor 7
dan Belanja Daerah
abupaten Lampung

RAN ANGGARAN
NGGARAN 2018.

8 sebagai berikut:

1,135,994,846,661

546,296,574,838

598,451,153,823

1,144,747,728,661
(8,752,882,000)

8,752,882,000
-

l 1 tercantum

ebih lanjut dalam



gaimana dimaksud

al 4 merupakan

ran ini dituangkan
a perangkat daerah

n Peraturan Bupati
pung Barat

Liwa

ember 2017

G BARAT,

ASRI

NOMOR 66